

The Influence Of Local Own-Source Revenue, Capital Expenditure, And Financial Performance On Economic Growth

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Dan Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Divya Chaerani Mulia Safitri¹, Arni Karina², Kumba Digdowiseiso^{3*}

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nasional, Jakarta^{1,2,3}

kumba.digdo@civitas.unas.ac.id³

*Corresponding Author

ABSTRACT

This study aims to analyze the Effect of Local Revenue, Capital Expenditures and Financial Performance on Economic Growth in the Districts / Cities of West Java Province in the 2014-2018 Period. The population in this study are regencies / cities in West Java Province. Data collection conducted in this study is to use documentation data that is secondary data in the form of Budget Realization and GRDP Reports in West Java Province that have been published. Data analysis method used is statistical analysis in the form of multiple linear regression tests. Data is processed using SPSS version 24.0. The results of this study indicate that the Local Revenue has a negative and significant effect on Economic Growth, this is evidenced at the significance level of 0.003 less than 0.05 and t arithmetic -3.054. Likewise, the Financial Performance also has a positive and significant effect on Economic Growth, this is evidenced at the significance level of 0.003 less than 0.05 with t arithmetic 3.079 and capital expenditure has no positive and no significant effect on economic growth evidenced the significance of 0.928 is greater than 0.05 and t count 0.090.

Keywords: Local Revenue, Capital Expenditures, Financial Performance, Economic Growth.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal Dan Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Barat Periode 2014-2018. Populasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten/ Kota yang ada pada Provinsi Jawa Barat. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data dokumentasi yaitu data sekunder yang berupa Laporan Realisasi Anggaran dan PDRB pada Provinsi Jawa Barat yang sudah dipublikasikan. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis statistik dalam bentuk uji regresi linear berganda. Data diolah dengan menggunakan SPSS versi 24.0. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negative dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, hal tersebut dibuktikan pada tingkat signifikansi 0,003 lebih kecil dari 0,05 dan t hitung -3,054. Demikian juga halnya dengan Kinerja Keuangan juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, hal tersebut dibuktikan pada tingkat signifikansi 0,003 lebih kecil dari 0,05 dengan t hitung 3,079 Dan Belanja Modal tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dibuktikan signifikansi 0,928 lebih besar dari 0,05 dan t hitung sebesar 0,090.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Kinerja Keuangan, Pertumbuhan Ekonomi.

1. Pendahuluan

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, kewajiban daerah mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 1 Undang - undang No.32 tahun 2004. Dengan adanya hal ini maka diharapkan terjadinya percepatan ekonomi dan mempercepat tujuan pembangunan nasional. Adanya otonomi daerah tentunya juga akan memacu daerah untuk mampu mengelola daerahnya sendiri agar mampu menjadi daerah yang mandiri dan menjadi sumber bagi pembangunan nasional. Dengan adanya rangsangan yang memacu daerah inilah yang akan membuat daerah berlomba-lomba meningkatkan potensinya masing-masing sehingga mampu menimbulkan suatu percepatan ekonomi (Supriyanto, 2022). Maka sangatlah jelas bahwa otonomi daerah

memiliki peran yang sangat penting terhadap pembangunan suatu daerah.

Kebijakan terkait otonomi daerah yang tertuang dalam Undang – Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dalam perkembangannya diperbarui dengan dikeluarkannya UU Nomor 32/2004. Pelaksanaan kebijakan tentang otonomi daerah di Indonesia dimulai secara efektif pada tanggal 1 Januari 2001, yang juga mengacu pada UU Nomor 25/1999 yang diperbaharui dengan UU Nomor 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah (Dwi Saraswati, 2018).

Tujuan otonomi daerah adalah untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, pengembangan demokrasi, keadilan dan pemerataan, pemeliharaan hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam rangka untuk melaksanakan pelayanan tersebut diperlukan pendanaan. Sumber-sumber pendanaan pemerintah daerah yang dikelola dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Pendapatan daerah yang dituangkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur, rasional, serta memiliki kepastian dasar hukum penerimanya (Yuliana, 2014).

Strategi pemerintah untuk melaksanakan kebijakan desentralisasi sebagai upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah yang dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan telah terlihat dengan jelas dan baik melalui kenaikan dana transfer ke daerah dari tahun ke tahun. Melalui kebijakan desentralisasi, daerah-daerah yang selama ini masih tertinggal diharapkan dapat mengejar ketertinggalan pertumbuhan ekonomi daerahnya yang sejalan dengan UU Nomor 32/2004 yang menyebutkan bahwa pemerintah daerah berhak untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut azas otonomi daerah, yang diarahkan untuk mempercepat tercapainya pertumbuhan ekonomi hingga terciptanya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta semua masyarakat.(Dwi Saraswati, 2018)

Menurut Yuliana (2014) penyusunan APBD diawali dengan membuat kesepakatan antara eksekutif dan legislative tentang kebijakan Umum APBD dan Prioritas serta Plafon Anggaran yang akan menjadi pedoman untuk penyusunan anggaran pendapatan dan anggaran belanja. Eksekutif membuat rancangan APBD sesuai dengan kebijakan umum APBD dan Prioritas & Plafon Anggaran yang kemudian diserahkan kepada legislatif untuk dipelajari dan dibahas bersama- sama sebelum ditetapkan sebagai Peraturan Daerah.

Pada hakikatnya pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka diperlukan peningkatan pertumbuhan ekonomi serta pemerataan distribusi pendapatan (Supriyanti, 2022). Masalah pertumbuhan ekonomi yang dihadapi oleh suatu daerah salah satunya dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah serta faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi seperti pendapatan asli daerah, belanja modal, dana perimbangan, dan tenaga kerja. (Sari, 2015)

Dalam proses penyelenggaraan dan penerapannya, otonomi daerah diperlukan dana yang besar. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah. Sesuai dengan pasal 5 UU Nomor 33/2004, sumber pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.

Dalam memperoleh PAD, daerah dituntut untuk dapat mengembangkan dan mengoptimalkan semua potensi daerah yang digali dari dalam wilayah daerah bersangkutan. Masalah yang sering muncul adalah rendahnya kemampuan pemerintah daerah untuk menghasilkan prediksi (perkiraan) penerimaan daerah yang sangat akurat sehingga belum dapat dipungut secara optimal. Melalui UU Nomor 33/2004 kemampuan daerah untuk memperoleh dana seharusnya dapat ditingkatkan. Peningkatan PAD yang dianggap sebagai modal yang

bersumber dari daerah, secara akumulasi seharusnya akan lebih menimbulkan eksternalisasi yang bersifat positif dan memberikan kontribusi yang akan mempercepat pertumbuhan ekonomi (Dwi Saraswati, 2018)

Salah satu belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah Belanja Modal. Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan untuk membangun aset tetap. Tujuan membangun aset tetap berupa fasilitas, sarana prasarana serta infrastruktur adalah menyediakan pelayanan publik yang memadai sehingga dapat meningkatkan produktivitas perekonomian. Apabila suatu daerah memiliki sarana prasarana yang memadai dapat membuat investor untuk melakukan investasi dan masyarakat dapat melakukan aktivitasnya sehari-hari dengan nyaman sehingga tingkat produktivitas akan semakin meningkat. Hal ini sesuai dengan Abimanyu (2005) yang menyatakan bahwa apabila belanja modal meningkat maka akan berdampak pada produktivitas masyarakat yang semakin meningkat dan bertambahnya jumlah investor yang melakukan investasi akan meningkatkan pendapatan asli daerah. (I Putu, 2014)

Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada 2019 diperkirakan tidak akan lebih baik dibandingkan capaian 2018 lalu. Pertumbuhan ekonomi Jabar pada tahun ini diperkirakan dikisaran 5,5 persen atau sedikit dibawah capaian 2018 yang tercatat 5,64 persen.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat Doni P. Joewono menjelaskan kondisi tersebut tidak lepas dari tekanan yang tengah dihadapi industri manufaktur akibat kondisi global. Jawa Barat yang 42 persen ekonominya digerakkan oleh sektor manufaktur dan sebagian besar berorientasi ekspor tentu akan sangat terpengaruh. Ketika pasar negara tujuan ekspor Jawa Barat permintaannya menurun maka kinerja ekspor Jabar pun akan menukik kebawah. sebagaimana terjadi di sebagian daerah, saat ini Provinsi Jawa Barat masih dihadapkan pada beberapa permasalahan, yang pertama, masih ada ketimpangan distribusi pendapatan yang dapat dilihat dari *indeks gini ratio* Provinsi Jawa Barat pada Maret 2018 mengalami kenaikan menjadi 0,407 dibandingkan September 2017 (0,393), dan tentu berada diatas gini ratio nasional sebesar 0,389.

Menurut Doni (2019) industri manufaktur yang menjadi tulang punggung tertekan, konsumsi pemerintah yang mestinya dapat diandalkan untuk mengompensasi melambatnya sektor manufaktur justru ikut melemah. Dikatakan, serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jabar saat ini baru dikisaran 30 persen. Bahkan, penyerapan APBD di 27 kabupaten/kota pun tidak lebih baik dari angka tersebut (www.bps.go.id).

Stabilitas keuangan Jawa Barat yang tercermin salah satunya dengan kinerja perbankan terpantau dalam kondisi yang cukup baik pada triwulan I 2018. Di tengah melambatnya pertumbuhan penghimpunan dana pihak ketiga (DPK), penyaluran kredit ke lokasi proyek di Jawa Barat masih tumbuh meningkat. Kredit tumbuh dari 7,81% pada triwulan IV 2017 menjadi 9,69% pada triwulan I 2018. Intermediasi perbankan yang antara lain dicerminkan melalui *Loan to Deposit Ratio* (LDR) juga tercatat meningkat menjadi 91,52%. Namun peningkatan intermediasi ini diikuti dengan meningkatnya risiko kredit atau *Non Performing Loan* (NPL). NPL meningkat baik untuk kredit yang disalurkan perbankan di seluruh wilayah untuk Jawa Barat (lokasi proyek) sebesar 3,41%, maupun dari bank-bank yang berkantor di Jawa Barat (lokasi bank) sebesar 3,97%. Khusus pada segmen korporasi, pertumbuhan kredit juga meningkat ke level 5,61% di tengah melambatnya penghimpunan DPK korporasi yang tumbuh sebesar 14,13%. Namun risiko kredit korporasi juga ikut meningkat dengan rasio NPL sebesar 4,80%. Hal serupa juga terjadi pada segmen rumah tangga, di mana penyaluran kredit meningkat di tengah melambatnya DPK. Walaupun risiko kredit rumah tangga ikut meningkat, namun rasio NPL-nya masih relatif rendah yakni sebesar 2,08%.

Sama halnya dengan realisasi belanja APBN, adapun realisasi belanja operasi pemerintah daerah melalui APBD Provinsi Jawa Barat pada triwulan I 2018 tercatat sebesar Rp3,12 Triliun, meningkat dibanding triwulan I 2017 sebesar Rp2,68 Triliun. Jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, pertumbuhan belanja operasi APBD Provinsi hingga triwulan I

2018 sebesar 16,54% melambat dibanding triwulan IV 2017 yang tumbuh sebesar 27,50%. Berdasarkan komponennya, peningkatan laju pertumbuhan disebabkan oleh meningkatnya pertumbuhan belanja hibah & bantuan keuangan dari 1,50% pada triwulan IV 2017 menjadi 22,68% pada triwulan I 2018. Adapun belanja hibah & bantuan keuangan memberikan kontribusi terbesar pada realisasi belanja Pemerintah Provinsi pada triwulan I 2018 yakni mencapai 54,94%. Di sisi lain, perlambatan laju pertumbuhan belanja dibanding triwulan sebelumnya terjadi pada belanja pegawai (dari 162,54% menjadi 22,29%) dan belanja barang (dari 52,01% menjadi -5,04%). Hal ini akibat efek base year, khususnya pada tahun 2017 sebagai implikasi dari pengalihan wewenang dari Pemerintah Kab/Kota ke Provinsi yang meningkatkan beban belanja Pemerintah Provinsi, baik untuk belanja pegawai maupun belanja.

Menurut Penelitian Yuliana (2014) Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, besarnya pengaruh PAD terhadap pertumbuhan ekonomi pada penelitian ini adalah relatif kecil yaitu sebesar 0,166. Hal ini menunjukkan masih ada faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi pada kota di pulau Sumatra. Besarnya belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi juga kecil yaitu sebesar 0,319. Hal ini juga perlu mendapatkan perhatian yang lebih meningkat.

Menurut penelitian Afina (2019) kinerja keuangan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi karena dilihat dari rasio kemandirian daerah pada penelitian yaitu sebesar 0,259 lebih besar dari nilai signifikan 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan tidak berpengaruh dan secara statistik tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Hubungan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Peningkatan PAD akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Adanya kenaikan PAD akan memicu dan memacu pertumbuhan ekonomi daerah menjadi lebih baik dari pada pertumbuhan ekonomi daerah sebelumnya. Kenaikan PAD juga dapat mengoptimalkan dan meningkatkan aktivitas pada sektor-sektor yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi, seperti sektor industri dan perdagangan, sektor jasa, dan sektor-sektor lainnya. (Anis Setiyawati, 2007)

Hubungan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Menurut teori Wagner dalam Yuliana (2014) menyatakan bahwa dalam suatu perekonomian apabila pendapatan perkapita meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi, kebudayaan dan sebagainya. Belanja daerah yang terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung merupakan bentuk pengeluaran pemerintah. Apabila pendapatan daerah yang terdiri dari PAD, Dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah meningkat maka belanja daerah yang terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung akan meningkat. Kenaikan belanja daerah akan berdampak pada kenaikan persentase PDRB. Nilai pertumbuhan PDRB merupakan representasi dari pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

Hubungan Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Mohamad Mahsun (2012:25), kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan / program/ kebijakandalam mewujudkan sasaran, tujuan visi dan misi organisasi yang tertuang dalam *Strategic Planning* suatu organisasi (Supriyanti, 2022). Sistem desentralisasi fiskal dimana pemerintah daerah memainkan peran yang lebih penting daripada pemerintah pusat dalam penyediaan pelayanan publik akan

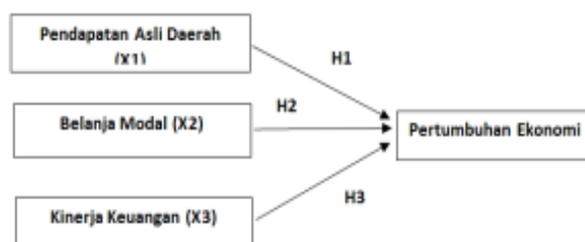
mendorong pertumbuhan ekonomi. Desentralisasi fiskal merupakan rasio yang menjelaskan kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah, semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah dalam menyelenggarakan desentralisasi, artinya akan semakin mandiri daerah tersebut dalam membiayai kegiatan perekonomian dan pemerintahannya.

2. Metode Penelitian

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah PAD, Belanja Modal, dan Kinerja Keuangan sebagai variable independen dan Pertumbuhan Ekonomi sebagai variable dependen pada Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Barat periode 2014-2018.

Populasi dan Sampel dalam penelitian ini adalah kabupaten/ kota pada Provinsi Jawa Barat dan sampel yang diambil adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA) periode 2014-2018. Teknik dan Alat Pengumpulan Data Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data dokumentasi yaitu data sekunder yang berupa Laporan Realisasi Anggaran dan PDRB pada Provinsi Jawa Barat yang sudah dipublikasikan. Pengambilan data dalam penelitian ini selama 5 (lima) periode tersebut dimaksudkan untuk melakukan uji regresi tahun 2014-2018.

Menurut (Priyatno, 2012) analisis regresi linier berganda adalah analisa untuk mengukur besarnya pengaruh antar dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen dan memprediksi variable dependen dengan menggunakan variabel independen. Analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda (multiple regression), yaitu dengan melihat PAD, Belanja Modal, Kinerja Keuangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.



Gambar 1

Sumber: Data diolah (2023)

3. Hasil Dan Pembahasan

Pengujian hipotesis bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh yang signifikan antara variabel independen kepada variabel dependen. Berdasarkan hasil pengujian dapat dilihat hasilnya pada uji t dalam penelitian ini, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

H₁: Pendapatan Asli Daerah Berpengaruh Positif Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Barat.

Hasil pengujian variabel Pendapatan Asli Daerah menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar -3,054 dengan nilai signifikansi sebesar 0,003. Perbandingan signifikansi $0,003 < 0,05$ maka H₁ ditolak atau dengan kata lain Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan namun bernilai negatif terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

H₂: Belanja Modal Berpengaruh Positif Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Barat.

Hasil pengujian variabel Belanja Modal menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar 0,090 dengan nilai signifikansi sebesar 0,928. Perbandingan signifikansi $0,928 > 0,05$ maka H₂ ditolak atau

dengan kata lain Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan namun bernilai positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

H₃: Kinerja Keuangan Berpengaruh Positif Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Barat..

Hasil pengujian variabel Kinerja Keuangan menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar 3,079 dengan nilai signifikansi sebesar 0,003. Perbandingan signifikansi $0,003 < 0,05$ maka H₃ diterima atau dengan kata lain Kinerja Keuangan berpengaruh Positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Daerah yang memiliki Kemajuan Industri dan memiliki kemajuan di bidang industri dan memiliki kekayaan alam yang melimpah cenderung memiliki PAD jauh lebih besar di banding daerah yang lain begitu pula sebaliknya. Karena itu terjadi kepentingan Pendapatan Asli Daerah dalam kaitan pelaksanaan otonomi daerah, kaerena PAD sebagai sumber penerimaan daerah sendiri untuk membiayai daerahnya dengan pendapatan yang dihasilkan sendiri. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan namun bernilai negatif terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Barat. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi 0.003 lebih kecil dari 0,05 dari t hitung sebesar -3,054. Dengan ini menunjukkan bahwa Tingkat Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Barat secara signifikan berpengaruh Negatif terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Hasil ini tidak sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli daerah memiliki hasil yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini memperlihatkan bahwa Kurangnya hubungan kerjasama pemerintah terhadap pihak-pihak swasta dalam perkembangan sektor industri dan jasa untuk mengoptimalkan penghasilan daerahnya sendiri dan masih tergantungnya pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Hal ini juga dikarenakan bahwa penarikan pajak dan retribusi daerah merupakan salah satu penghambat pertumbuhan ekonomi daerah di Provinsi Jawa Barat. (www.portaljabar.net).

Hasil penelitian ini Konsisten dengan penelitian Dewi Chrisanty Paat, Rosalina A,M. Koleangan (2014) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh Negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di kota Bitung. Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian Fadila (2017) yang menyatakan Bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. Dan penelitian Yuliana (2014) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah Berpengaruh Positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/ kota di Sumatera.

Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan untuk pengadaan aset tetap. Tujuan pembangunan aset tetap berupa fasilitas, sarana dan prasarana, serta infrastruktur merupakan menyediakan pelayanan publik yang memadai sehingga dapat meningkatkan produktifitas perekonomian. Belanja modal yang dilakukan saat ini akan memberikan manfaat jangka panjang dan menengah yang bersifat tidak rutin. Semakin tinggi tingkat rasio semakin tinggi tingkat investasi asset modal yang dilakukan pemerintah daerah dan sebaliknya. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan namun bernilai positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Barat.

Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi 0.928 lebih besar dari 0,05 dari t hitung sebesar 0,090. Dengan ini menunjukkan bahwa Tingkat Belanja Modal pada Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Barat tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih kurang tepatnya kebijakan-kebijakan pengalokasian belanja modal sehingga tidak mampu mendorong peningkatan permintaan produksi daerah.

Menurut sisa lebih perhitungan anggaran, yaitu selisih lebih dari realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode anggaran di Provinsi Jawa Barat menunjukkan bahwa perencanaan penganggaran dan pelaksanaan program tidak berjalan dengan baik. (www.economy.okezone.com)

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Ahmad Fajri (2016) yang menyatakan bahwa Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi di Sumatera. Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian Fadilah (2017) yang menyatakan Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur

Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

kinerja keuangan daerah adalah tingkat capaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan suatu daerah dalam mengelola keuangannya. Semakin tinggi rasio kemandirian daerah semakin mengandung arti tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern semakin rendah begitu pula sebaliknya. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan berpengaruh Positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Barat. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi 0.003 lebih kecil dari 0,05 dari t hitung sebesar 3,079.

Dengan ini menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan pada Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Barat berpengaruh positif signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah mengelola keuangannya dengan baik dan memiliki kontribusi untuk peningkatan otonomi daerah. Adanya pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah daerah pada Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Barat oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang mengatakan bahwa kegiatan atau program yang dilakukan pemerintah daerah terkait keuangan menghasilkan sajian laporan keuangan yang tertib, ekonomis, efisien, efektif dan transparan dan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian. Hal ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan otonomi daerahnya. (www.jabarekspres.com)

Hasil penelitian ini Konsisten Dengan penelitian Greydi Normala Sari, Paulus Kindangen, tru oldy rotinsulu (2014) yang menyatakan bahwa Kinerja Keuangan berpengaruh Positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi perkotaan Provinsi Sulawesi. Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian Afina Dwi Sartika (2019) menyatakan bahwa Kinerja keuangan tidak berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

4. Penutup Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan analisis data yang telah dilakukan oleh peneliti yaitu mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan Kinerja Keuangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Periode 2014-2018. Terdapat 26 Kabupaten/Kota yang menjadi sampel pada penelitian ini. . Dari hasil pengujian menggunakan SPSS Versi 24.0, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh Negatif dan Signifikan terhadap Pertumbuhan ekonomi. bahwa Kurangnya hubungan kerjasama pemerintah terhadap pihak-pihak swasta dalam perkembangan sektor industri dan jasa untuk mengoptimalkan penghasilan daerahnya sendiri.
2. Belanja Modal berpengaruh Positif dan Tidak Signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Ini menunjukkan masih kurang tepatnya kebijakan pengalokasian belanja modal sehingga tidak mampu mendorong peningkatan permintaan produksi daerah.
3. Kinerja Keuangan berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Semakin tinggi kemandirian daerah maka semakin mengandung arti tingkat ketergantungan

daerah terhadap bantuan pihak ekstern/ pemerintah pusat menjadi semakin rendah begitu pula sebaliknya.

Saran Dari hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang telah diambil maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut: 1. Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat diharapkan untuk dapat mengoptimalkan pendapatan asli daerah dengan menggali potensi-potensi dan sumber daya yang dimiliki serta memaksimalkan lagi kerja sama dengan pihak swasta maupun daerah.

Selain itu juga diharapkan semakin memperhatikan alokasi belanja modal yang menjadi prioritas dalam upaya pembangunan daerah, agar sarana dan prasarana yang ada dapat lebih baik lagi, dengan harapan pembangunan sarana dan prasarana tidak terkesan menghambur hamburkan ketika fasilitas yang dibuat ternyata belum dibutuhkan masyarakat. Supaya lebih mengintensifkan sumber-sumber pendapatan asli daerah guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi, karena peningkatan asli daerah secara langsung berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 2. Bagi Peneliti Selanjutnya Peneliti selanjutnya harus mempertimbangkan untuk mengambil sampel yang lebih banyak dengan rentan waktu lebih lama dan menambahkan variabel-variabel lainnya agar hasil dari penelitian yang dihasilkan lebih optimal.

Daftar Pustaka

- Afina D.S, (2019). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening*. Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Ahmad Fajri (2016). *Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi-Provinsi Sumatra*. Universitas Jambi.
- Arsyad, Lioncin (2010). *Ekonomi Pembangunan Edisi 5*. Yogyakarta UPP STIM YKPN. Halaman:89
- Dwi Saraswati. (2018). *Pengaruh pendapatan asli daerah, belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi dan dana perimbangan sebagai pemoderasi di kabupaten/kota Sumatera Utara*. Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik Vol. 8 No.2 Januari (2018). Universitas Pembangunan Panca Budi.
- Dewi Chrisanty Paat dkk. (2014). *Pengaruh pendapatan asli daerah, Dana Perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi Serta Dampaknya Terhadap Kemiskinan Di Kota Bitung*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi, Manado.
- Fadilah (2017). *Pengaruh Pendapatan Daerah, Belanja Modal dan Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur*. Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Ghozali, Imam. (2009). *Ekonomitrika Teori, Konsep, dan Aplikasi dengan SPSS 17*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Halaman:97-150
- Halim, Abdul. (2007). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta, Salemba Empat.
- I Putu dan A.A.N.B Dwirandra. (2014). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Pada Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Pemoderasi*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana.
- Mahsun, Mohamad. (2012). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik, BPFE- Yogyakarta:25 dan 196*.
- Mardiasmo. (2002).. *“Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah”*. Penerbit ANDI, Yogyakarta. Halama:121
- Normala, Greydi. (2014). *Pengaruh kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Perkotaan Di Sulawesi Utara Tahun 2004-2014*. Jurnal Universitas Sam Ratulangi, Manado.
- Priyatno, Duwi. (2012). *Cara Kilat Belajar Analisis Data Dengan SPSS 20*. Yogyakarta: Andi Offset. Halaman:172

- Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2015 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 33 tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2014 tentang *Pemerintah Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang *SAP*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang *Belanja Daerah*.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 tentang *"Klasifikasi Anggaran"*.
- Setiyawati, Hamzah. (2007). *Analisis Pengaruh PAD,DAU,DAK, dan Belanja Pembangunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan Pengangguran:Pendekatan Analisis Jalur*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia Vol. 4, No.2 : 211-228
- Sari. (2015). *Pengaruh pendapatan asli daerah, belanja modal, dana perimbangan, tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi*. Skripsi Universitas Diponegoro Semarang.
- Supriyanto, A. (2022) 'Komitmen Organisasi: Ditinjau dari Kepemimpinan Transformasional dan Kepemimpinan Transaksional Yang Dimoderasi Leader-Member Exchange', *Jurnal Ilmiah Bisnis dan Keuangan*, 11(1).
- Supriyanto, A. (2022) 'Peran Nilai-Nilai Islami Dalam Kewirausahaan Untuk Menunjang Sebuah Kinerja Bisnis', *El-Hekam*, 7(1), pp. 69–82.
- Supriyanto, A. et al. (2022) 'Kesuksesan Muslimah Pelaku UMKM: Peran Dimensi Entrepreneurial Orientation', *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 10(2), pp. 267–286.
- Tambunan, Tulus. (2006). *Upaya-Upaya Meningkatkan Daya Saing Daerah*. Yogyakarta: Andi Offset. Halaman:36.
- Tambunan, Tulus. (2016). *Perekonomian Indonesia Era Orde Baru Hingga Jokowi*. Bogor: Ghalia Indonesia. Halaman:78 & 86.
- Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*.